

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN NATUNA



2019



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NATUNA**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN NATUNA



2019

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN NATUNA 2019

ISBN: 978-623-94884-6-8

No. Publikasi: 21030.2029

Katalog: 4102004.2103

Ukuran Buku: 17,6 cm × 25 cm

Jumlah Halaman: xvi + 81 halaman

Naskah:

BPS Kabupaten Natuna

Penyunting:

BPS Kabupaten Natuna

Desain Kover:

BPS Kabupaten Natuna

Diterbitkan oleh:

©BPS Kabupaten Natuna

Dicetak oleh:

Percetakan Rizky Mandiri

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Indikator kesejahteraan Rakyat Kabupaten Natuna 2019

Pengarah

Ahmad Chaidir

Penulis

Lia Oktavera
Arif Rachmatillah Amin
Arlita Gariana

Pengolah Data

Lia Oktavera
Arif Rachmatillah Amin
Arlita Gariana

Pembuat Infografis

Irina Hidayati

Editor

Muhamad Andries

Desain Kulit

Seksi Neraca dan Analisis Statistik BPS Kabupaten Natuna

Kata Pengantar

Publikasi “Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Natuna 2019” merupakan publikasi yang disajikan berkala setiap tahun. Publikasi ini menyajikan tingkat kesejahteraan rakyat Kabupaten Natuna antar waktu dan perbandingannya antar jenis kelamin. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Natuna, BPS Provinsi Kepulauan Riau, dan instansi lain di luar BPS. Sebagian besar data yang dimuat dalam publikasi ini bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2019. Khusus untuk data ketenagakerjaan bersumber dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) keadaan bulan Agustus 2019.

Publikasi ini mencakup pada aspek yang dapat diukur dan tersedia datanya, seperti kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan serta aspek sosial lainnya.

Ranai, November 2020
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Natuna



Ahmad Chaidir, S.Si

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1 KEPENDUDUKAN	3
BAB 2 KESEHATAN DAN GIZI	17
BAB 3 PENDIDIKAN	29
BAB 4 KETENAGAKERJAAN	41
BAB 5 TARAF DAN POLA KONSUMSI	53
BAB 6 PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	61
BAB 7 KEMISKINAN	71
BAB 8 SOSIAL LAINNYA	77

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Natuna, 2010-2019	5
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur Kabupaten Natuna, 2019	8
Tabel 1.3 Angka Ketergantungan Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur Kabupaten Natuna, 2015-2019	10
Tabel 1.4 Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Umur Perkawinan Pertama Kabupaten Natuna, 2019	12
Tabel 1.5 Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas menurut Status Perkawinan Kabupaten Natuna, 2019	13
Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat di Kabupaten Natuna, 2019	22
Tabel 2.2 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir Dalam, 2017-2019	25
Tabel 3.1 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut ijazah/STTB Tertinggi yang dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Natuna (persen), 2019	33
Tabel 4.1 Angkatan Kerja di Kabupaten Natuna (persen), 2019	43

Tabel 4.2	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Natuna, 2019	45
Tabel 4.3	Distribusi Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Natuna, 2019	47
Tabel 4.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Natuna, 2019	49
Tabel 5.1	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Natuna (rupiah), 2019	55
Tabel 5.2	Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Natuna (rupiah), 2019	57
Tabel 6.1	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas di Kabupaten Natuna (persen), 2019	62
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas di Kabupaten Natuna (persen), 2019	64
Tabel 6.3	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan di Kabupaten Natuna (persen), 2019	65

Tabel 6.4	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Utama di Kabupaten Natuna (persen), 2019	66
Tabel 8.1	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir menurut Jenis Jaminan Sosial, 2019	80
Tabel 8.2	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset menurut Jenis Aset, 2019	81

<https://natunakab.bps.go.id>

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Natuna Hasil Proyeksi SP2010, 2010-2019	4
Gambar 1.2	Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>) Kabupaten Natuna, 2013-2019	6
Gambar 2.1	Angka Harapan Hidup Kabupaten Natuna (tahun), 2010-2019	19
Gambar 2.2	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir, 2017-2019	20
Gambar 2.3	Persentase Penduduk yang Mengalami Kesakitan Selama Sebulan Terakhir, 2017-2019	21
Gambar 2.4	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan, 2017-2019	23
Gambar 2.5	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Jenis Jaminan Kesehatan, 2019	24
Gambar 2.6	Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Natuna, 2019	24
Gambar 3.1	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Jenis Kelamin 2019	30
Gambar 3.2	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas di Kabupaten Natuna (tahun), 2019	31

Gambar 3.3	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut status pendidikan, 2019	32
Gambar 3.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Natuna, 2019	34
Gambar 3.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Natuna, 2019	36
Gambar 3.6	Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Natuna, 2019	37
Gambar 4.1	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Natuna, 2010-2019	44
Gambar 4.2	Distribusi Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Natuna, 2019	46
Gambar 5.1	Persentase Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Natuna (persen), 2019	54
Gambar 6.1	Persentase Rumah Tangga menurut jenis Dinding Terluas di Kabupaten Natuna (persen), 2019	63
Gambar 6.2	Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Natuna (persen), 2019	67
Gambar 6.3	Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Natuna (persen), 2019	68
Gambar 7.1	Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Natuna (persen), 2015-2019	72

Gambar 7.2	Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Natuna (ribu rupiah), 2015-2019	73
Gambar 7.3	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Natuna (ribu rupiah), 2015-2019	74
Gambar 8.1	Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir, 2019	78
Gambar 8.2	Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima, 2019	79

<https://natunakab.go.id>



1

Kependudukan

Rasio Jenis Kelamin

105,83

Setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 105 - 106 orang penduduk laki-laki



Laju Pertumbuhan
Penduduk (%)

1,04



Kependudukan

Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang menitik beratkan pada perkembangan penduduk sebagai pusat dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan ini dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk, dalam artian dapat mengurangi jumlah penduduk miskin, menurunkan tingkat pengangguran, serta menyediakan pendidikan yang terjangkau untuk seluruh penduduk.

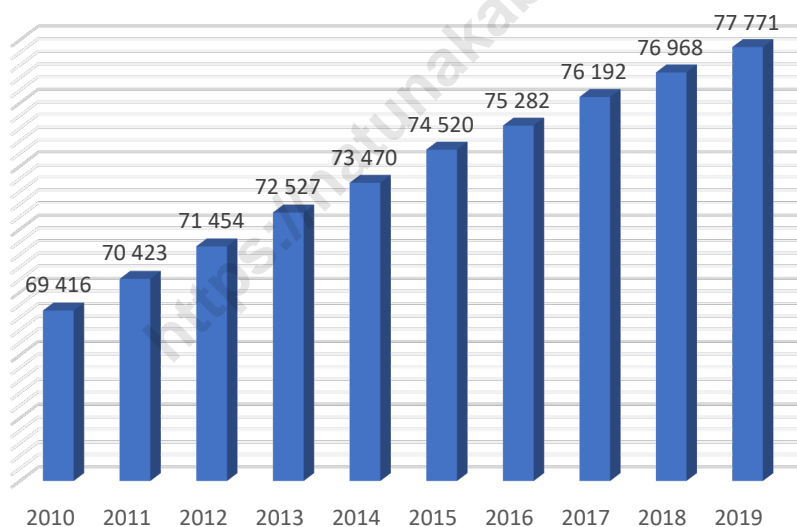
Ketika jumlah penduduk yang besar kemudian diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi pula. Sehingga kualitas dan kuantitas penduduknya dapat menjadi tolak ukur yang digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan.

Data proyeksi penduduk yang merupakan salah satu perhitungan Badan Pusat Statistik dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan data mengenai kependudukan. Sehingga dapat menjadi penunjang keberhasilan pembangunan dan menentukan arah kebijakan yang ingin dicapai, khususnya isu kependudukan yang sering menjadi perhatian utama, yakni jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Selama periode tahun 2010 hingga 2019 (lihat Gambar 1.1), jumlah penduduk Kabupaten Natuna dari hasil Proyeksi SP2010 menunjukkan bahwa pada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Jika dilihat dalam hal jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna menempati peringkat terendah kedua dengan jumlah penduduk sebanyak 77.771 jiwa di tahun 2019.

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Natuna Hasil Proyeksi SP2010, 2010-2019



Sumber : BPS, Proyeksi SP2010

Dalam sembilan tahun terakhir, jumlah penduduk terus bertambah namun laju pertumbuhannya relatif mengalami perlambatan. Dalam hal ini, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Natuna masih berada di kriteria pertumbuhan penduduk dibawah 1,5

persen. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah cukup berhasil dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Natuna, 2010-2019

Tahun	Jumlah Penduduk (Juta)	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)
(1)	(2)	(3)
2010	69.416	-
2011	70.423	1.45
2012	71.454	1.46
2013	72.527	1.50
2014	73.470	1.30
2015	74.520	1.43
2016	75.282	1.02
2017	76.192	1.21
2018	76.968	1.02
2019	77.771	1.04

Sumber: BPS, Proyeksi SP2010

Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Sebanyak 77.771 jiwa penduduk berdomisili di Kabupaten Natuna dengan wilayah seluas 1.869,95 km². Meskipun Kabupaten Natuna memiliki luas wilayah cukup besar di Provinsi Kepulauan Riau,

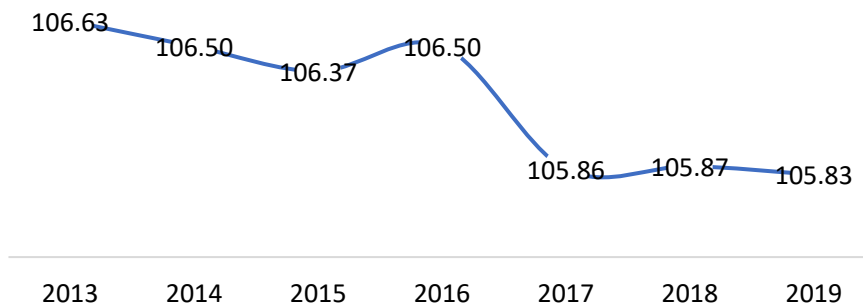
tetapi jumlah kepadatan penduduknya yang paling sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Natuna belum mempunyai daya Tarik bagi penduduk untuk bermukim di Kabupaten Natuna. Sementara, data mencatat kepadatan penduduk Kabupaten Natuna sebesar 41,59 yang berarti bahwa tiap satu km² didiami oleh 41-42 jiwa penduduk.

Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah dan komposisi tidak seimbang akan menjadi beban bagi pembangunan. Namun, apabila jumlah penduduk besar dan memiliki kualitas yang baik maka akan menjadi modal dasar pembangunan.

Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengetahui komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan penduduk laki-laki dengan perempuan, sehingga penggambarannya berupa banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Gambar 1.2 Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) Kabupaten Natuna, 2013-2019



Sumber: BPS, Proyeksi SP2010

Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Natuna dari tahun ke tahun berada diatas 100, hal ini menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Berdasarkan (Gambar 1.2) tercatat rasio jenis kelamin pada tahun 2019 sebesar 105,83. Ini berarti bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki.

Rasio jenis kelamin pada kelompok umur (0-4) tahun tercatat 101,66 yang memberikan informasi bahwa jumlah penduduk pada kelompok umur tersebut lebih banyak penduduk berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan hidup balita laki-laki (0-4) tahun di Natuna sudah baik. Menurut teori demografi, kelompok umur 0-4 tahun pada penduduk laki-laki lebih rentan terhadap masalah Kesehatan sehingga kualitas ketahanan hidupnya lebih rendah daripada perempuan.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur Kabupaten Natuna, 2019

Kelompok Umur	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Total (jiwa)	Sex Ratio (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0-4	3,426	3,37	6,796	101.66
5-9	4,086	4,04	8,126	101.14
10-14	4,658	4,376	9,034	106.44
15-19	3,822	3,201	7,023	119.40
20-24	1,743	1,423	3,166	122.49
25-29	2,162	2,253	4,415	95.96
30-34	2,828	2,793	5,621	101.25
35-39	3,366	3,287	6,653	102.40
40-44	3,249	3,259	6,508	99.69
45-49	3,301	3,162	6,463	104.40
50-54	2,514	2,133	4,647	117.86
55-59	1,836	1,557	3,393	117.92
60-64	1,364	1,263	2,627	108.00
65+	1,632	1,667	3,299	97.90
Total	39,987	37,784	77,771	105.83

Sumber: BPS, Proyeksi SP2010

Hal menarik yang dapat dilihat pada (Tabel 1.2) rasio jenis kelamin pada penduduk umur produktif yaitu pada umur 25-29 tahun berada di bawah 100. Artinya adalah penduduk yang termasuk usia tersebut lebih banyak penduduk perempuan dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki pada kelompok usia 25-29 tahun memiliki mobilitas yang lebih tinggi

daripada perempuan terkait dengan aktivitas sekolah ataupun bekerja.

Pada kelompok umur 65⁺, rasio jenis kelamin menunjukkan angka dibawah 100. Selain faktor mobilitas, ketahanan hidup laki-laki usia lanjut dapat menjadi penyebab rendahnya jumlah penduduk laki-laki dibandingkan perempuan. Pada kelompok umur tersebut rasio jenis kelamin tercatat sebesar 97,90. Angka tersebut menjelaskan bahwa pada kelompok usia umur tersebut terdapat 97 penduduk laki-laki dari 100 penduduk perempuan. Hal ini mencerminkan angka harapan hidup perempuan yang biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Rasio Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan atau Rasio Ketergantungan (*Defendency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif dengan penduduk usia tidak produktif. Penduduk usia produktif itu sendiri adalah penduduk pada kelompok usia 15-64 tahun (disebut juga angkatan kerja) yang dapat memperoleh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, sedangkan penduduk tidak produktif yaitu penduduk pada kelompok usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) yang tidak dapat memperoleh penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah. Semakin tingginya rasio

ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif dalam membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Makin besar angka ketergantungan, makin besar pula beban tanggungan suatu daerah. Sementara itu, apabila persentase *dependency ratio* semakin rendah, semakin rendah pula beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 1.3 Angka Ketergantungan Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur Kabupaten Natuna, 2015-2019

Tahun	0-14 th	15-64 th	65+ th	Angka Ketergantungan (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	24.720	47.194	2.606	57,9
2016	24.683	47.846	2.753	57,34
2017	24.551	48.721	2.920	56,38
2018	24.281	49.589	3.098	55,21
2019	23.956	50.516	3.299	53.95

Sumber: BPS, Proyeksi SP2010

Berdasarkan proyeksi penduduk hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Natuna tahun 2019 sebanyak 50,516 jiwa atau sebesar 64,95 persen dari total penduduk.

Sementara itu, jumlah penduduk belum produktif sebanyak 23,956 jiwa (30,80 persen) dan usia sudah tidak produktif sebanyak 3,299 jiwa (4,24 persen). Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Natuna cenderung menurun dari tahun 2015 sampai 2019. Pada tahun 2015 rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Natuna tercatat 57,90 persen, lalu mengalami penurunan hingga 53,95 persen di tahun 2019. Rasio ketergantungan pada tahun 2019 menggambarkan setiap 100 penduduk usia produktif mempunyai tanggungan 53 penduduk usia tidak produktif.

Umur Kawin Pertama (UKP)

Umur perkawinan pertama adalah umur pada saat perempuan melakukan perkawinan yang pertama kali. Umur perkawinan pertama pada perempuan merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi tingkat fertilitas karena semakin muda umur perkawinan pertama maka akan berpeluang untuk melahirkan banyak anak. Dengan adanya program Keluarga Berencana serta didukung oleh usaha penundaan umur perkawinan pertama akan membantu menurunkan angka fertilitas.

Tabel 1.4 Persentase Perempuan yang Pernah Kawin Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Umur Perkawinan Pertama Kabupaten Natuna, 2019

Umur Kawin Pertama (tahun)	Persentase (%)
(1)	(2)
≤16	15,51
17-18	23,47
19-20	21,3
21+	39,72

Sumber: BPS, Susenas 2019

Secara umum, perempuan Kabupaten Natuna pertama kali menikah pada kelompok umur 21 tahun ke atas sebesar 39,72 persen. Hasil Susenas 2019 menunjukkan perempuan yang berumur 19-20 tahun di Kabupaten Natuna menikah pertama kali sebanyak 21,30 persen. Sementara itu, terdapat 23,47 persen perempuan berumur 10 tahun ke atas di Kabupaten Natuna menikah pertama kali pada usia 17-18 tahun, dan 15,51 persen yang menikah pertama kali pada usia 16 tahun ke bawah.

Status Perkawinan

Status kawin tidak hanya bagi mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya) tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai

suami istri. Dalam Sakernas, status perkawinan meliputi, belum kawin, kawin dan cerai (cerai hidup, dan cerai mati).

Tabel 1.5 Persentase Penduduk umur 10 Tahun ke Atas menurut Status Perkawinan Kabupaten Natuna, 2019

Status Perkawinan	Persentase
(1)	(2)
Belum Kawin	33,42
Kawin	60,39
Cerai	6,19

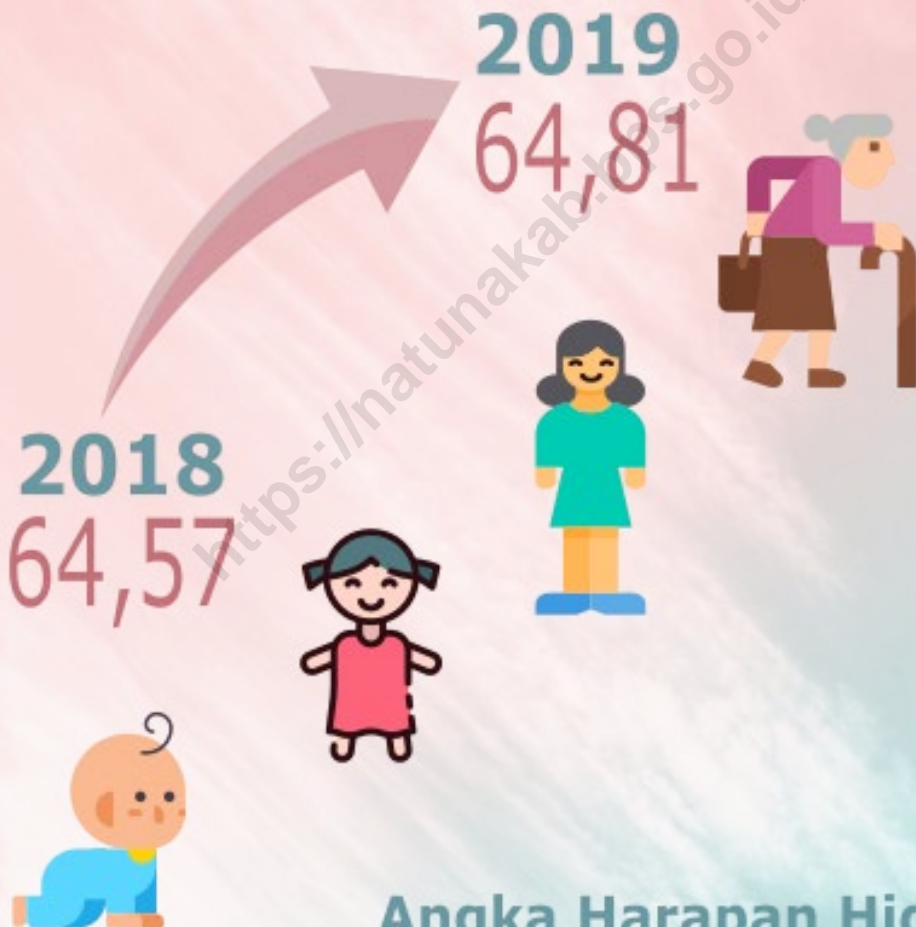
Sumber : BPS, Susenas 2019

Berdasarkan hasil Susenas 2019, sebanyak 33,42 persen penduduk yang berumur 10 tahun ke atas belum terikat dalam perkawinan. Sedangkan, penduduk yang berumur 10 tahun ke atas terikat dalam perkawinan sebanyak 60,39 persen, dan sisanya berstatus cerai sebesar 6,19 persen.



2

Kesehatan



Angka Harapan Hidup
Kabupaten Natuna

Kesehatan dan Gizi

Salah satu aspek penting kesejahteraan adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Selain itu, aspek penting lainnya yang turut memengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan yang antara lain diukur melalui angka kesakitan dan status gizi. Kebijakan pemerintah untuk menanggulangi hambatan biaya dalam mengakses pelayanan kesehatan dilakukan dalam bentuk pemberian subsidi pelayanan kesehatan dengan program Askeskin yang berlaku sejak 1 Januari 2005.

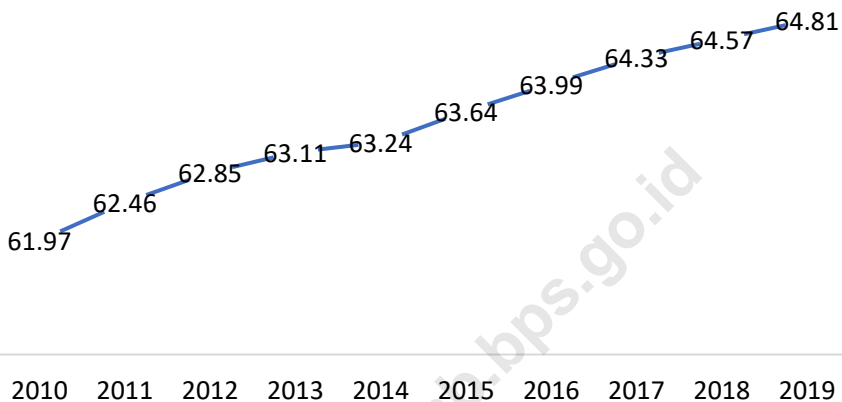
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta kualitas kehidupan dan usia harapan hidup sekaligus mempertinggi kesadaran masyarakat atas pentingnya hidup sehat. Target grup pembangunan kesehatan lebih ditekankan pada masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok masyarakat tertinggal. Untuk itu, peran serta masyarakat terus ditingkatkan melalui pengelolaan kesehatan terpadu, termasuk dunia usaha. Secara kuantitas dan kualitas, penyediaan berbagai sarana kesehatan, tenaga kesehatan, dan penyediaan obat juga terus ditingkatkan.

Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Derajat kesehatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia. Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat dijadikan tolak ukur umur panjang dan hidup sehat. Angka harapan hidup saat lahir merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan.

Selama tahun 2010-2019, AHH Kabupaten Natuna terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Pada tahun 2019, AHH penduduk Kabupaten Natuna mencapai usia 64,81 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa anak yang lahir pada tahun 2019 diperkirakan akan hidup rata-rata sekitar 64 tahun. Beberapa faktor yang meningkatkan AHH di Kabupaten Natuna adalah membaiknya akses dan pelayanan Kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat masyarakat serta meningkatnya dukungan Kesehatan lingkungan.

Gambar 2.1 Angka Harapan Hidup Kabupaten Natuna (tahun), 2010-2019

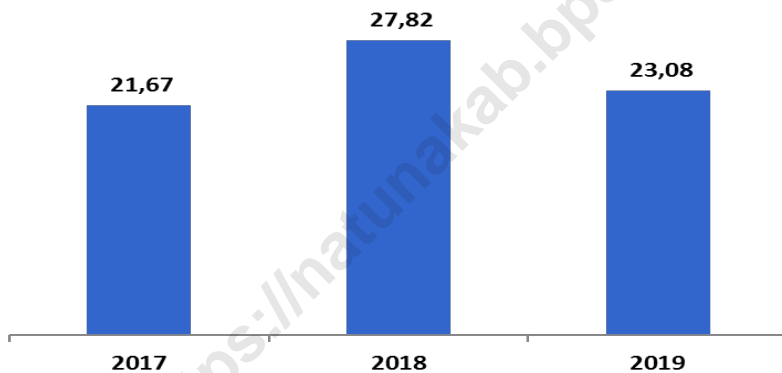


Sumber: BPS, Susenas 2019

Keluhan kesehatan yang terjadi pada penduduk dapat memberikan satu informasi yang penting untuk melihat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Data mengenai persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dapat digunakan oleh pemerintah dalam upaya mengintervensi program-program kesehatan. Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminal atau hal lain. Menderita sakit adalah mengalami keluhan kesehatan dan terganggunya pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari dalam referensi waktu sebulan terakhir.

Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir pada tahun 2019 sebesar 23,08 persen mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 27,82 persen. Pada Gambar 2.2 terlihat bahwa dalam tiga tahun terakhir, keluhan kesehatan yang dialami mengalami fluktuasi.

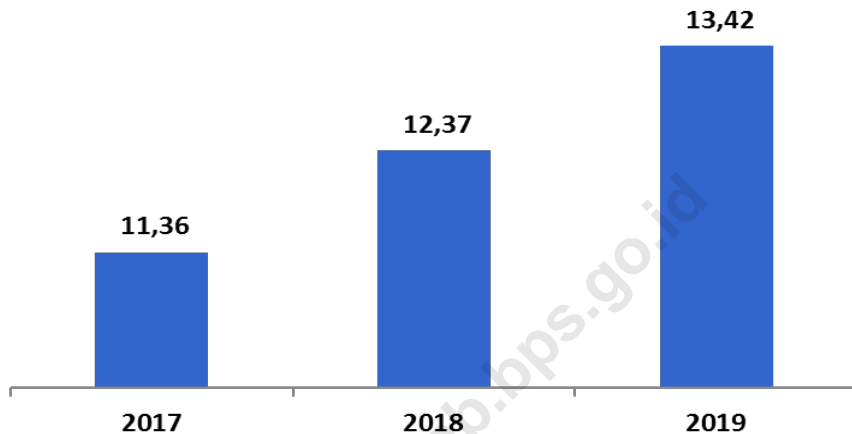
Gambar 2.2 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir, 2017-2019



Sumber: BPS, Susenas 2019

Penduduk dikatakan sakit jika keluhan kesehatan yang dialami menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Berbeda dengan keluhan kesehatan, dalam tiga tahun terakhir penduduk yang sakit cenderung meningkat. Persentase penduduk yang sakit (angka kesakitan) pada tahun 2019 sebesar 13,42 persen meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 12,37 persen.

Gambar 2.3 Persentase Penduduk yang Mengalami Kesakitan Selama Sebulan Terakhir, 2017-2019



Sumber: BPS, Susenas 2019

Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan adalah menyediakan dan memperbaiki fasilitas kesehatan. Selain itu meningkatkan mutu pelayanan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan yang tersedia. Beberapa fasilitas kesehatan yang biasanya digunakan penduduk untuk berobat jalan adalah Rumah Sakit, klinik, praktek dokter/bidan, Puskesmas, praktik pengobatan tradisional dan lainnya.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat di Kabupaten Natuna, 2019

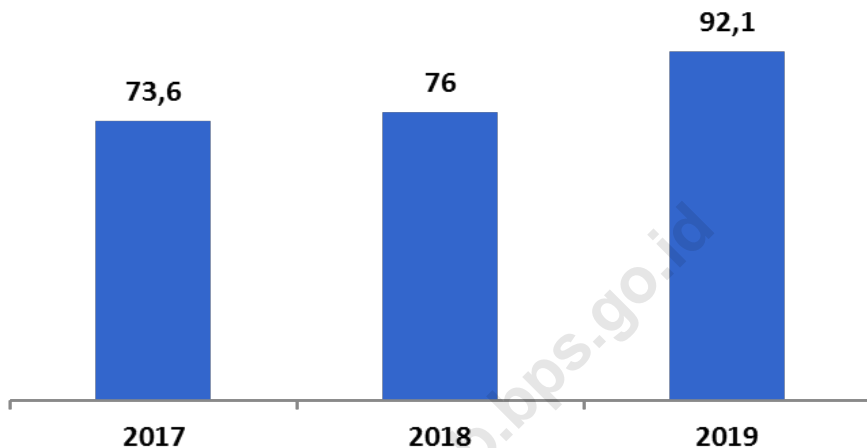
Tempat Berobat	2019
RS pemerintah	8,76
RS swasta	0,08
praktik dokter/bidan	37,38
klirik/praktik dokter bersama	7,27
puskesmas/pustu	40,69
UKBM	6,18
pengobatan tradisional/alternatif	5,82

Sumber: BPS, Susenas 2019

Dari tabel 2.1 dapat terlihat bahwa, penduduk Kabupaten Natuna banyak yang datang berobat ke puskesmas/pustu dan praktik dokter/bidan dengan masing-masing sebesar 40,69 persen dan 37,38 persen. Selebihnya masih dibawah 10 persen.

Jika dilihat dari kepemilikan jaminan kesehatan, penduduk Kabupaten Natuna sampai tahun 2019 sudah cukup banyak yang memiliki. Dari gambar 2.4 sudah mencapai 93 persen penduduk Kabupaten Natuna yang memiliki fasilitas kartu jaminan kesehatan.

Gambar 2.4 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan, 2017-2019

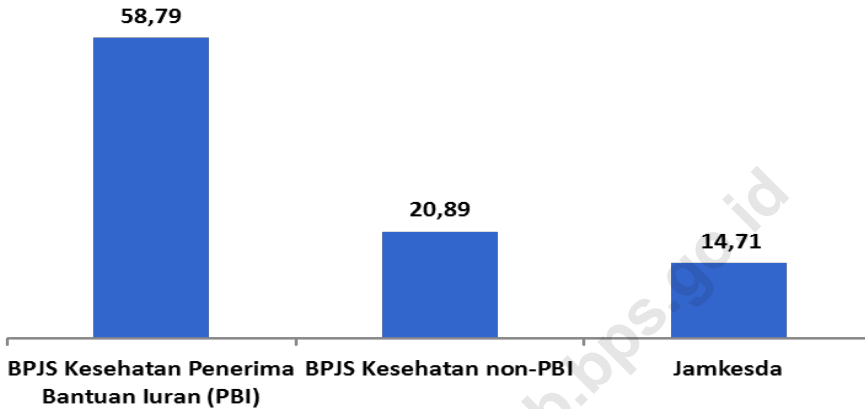


Sumber: BPS, Susenas 2019

Saat ini terdapat beragam jaminan kesehatan yang tersedia, mulai dari BPJS Kesehatan yang dibedakan menjadi BPJS kesehatan PBI dan BPJS kesehatan Non-PBI, jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), jaminan kesehatan yang disediakan oleh perusahaan/kantor tempat bekerja, ataupun asuransi swasta.

Kepemilikan jaminan kesehatan tertinggi yang ada di Kabupaten Natuna adalah BPJS kesehatan PBI dan Non PBI serta Jamkesda. BPJS kesehatan PBI sebesar 58,79 persen dan Non PBI sebesar 20,89 persen. Sedangkan Jamkesda yang merupakan jaminan kesehatan pembiayaannya berasal dari APBD daerah dan biasanya diperuntukkan bagi penduduk setempat yang belum memiliki jaminan kesehatan. Persentase kepemilikan jaminan kesehatan Jamkesda tercatat sebesar 14,71 persen.

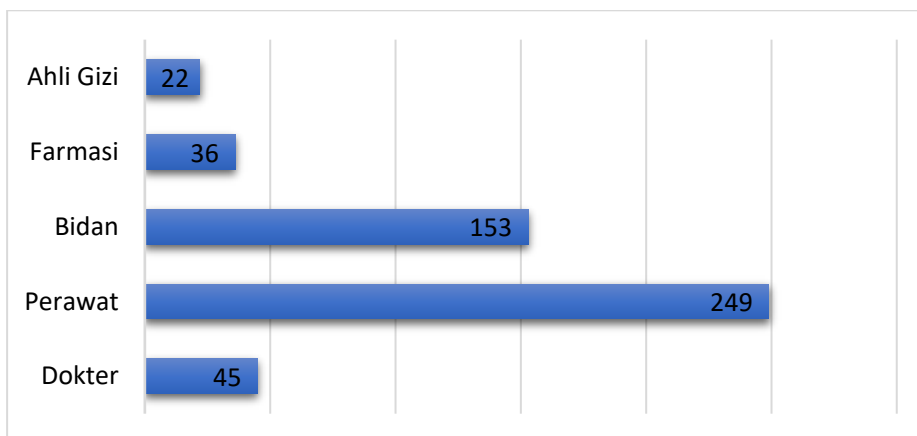
Gambar 2.5 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan menurut Jenis Jaminan Kesehatan, 2019



Sumber: BPS, Susenas 2019

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang memiliki pengetahuan dan atau keterampilan bidang kesehatan dan melakukan upaya kesehatan untuk masyarakat umum mencakup dokter, perawat, bidan, farmasi dan ahli gizi.

Gambar 2.6 Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Natuna, 2019



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna

Dari gambar 2.6 terlihat bahwa tenaga Kesehatan terbanyak di Kabupaten Natuna berprofesi sebagai Perawat dengan jumlah 249 orang. Kemudian disusul oleh Bidan dengan jumlah 153 orang. Selebihnya untuk profesi Dokter, Farmasi serta Ahli Gizi masing-masing masih dibawah 100 orang.

Penolong Persalinan

Salah satu target dalam SDGs adalah menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI). Banyak kematian ibu disebabkan komplikasi selama masa kehamilan atau persalinan yang tidak aman. Salah satu upaya dalam menurunkan risiko kematian jika terjadi komplikasi persalinan adalah dengan melahirkan di fasilitas kesehatan dan dibantu oleh tenaga kesehatan profesional.

Tabel 2.2 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir Dalam, 2017-2019

Tahun	Penolong Kelahiran Terakhir		
	Dokter	Bidan	Dukun Beranak
2017	31,74	56,99	0
2018	33,06	61,94	5
2019	36,53	55,62	5,4

Sumber: BPS, Susenas 2019

Pada Tabel 2.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2019 sebagian besar perempuan melahirkan dengan dibantu tenaga kesehatan khususnya Bidan sebesar 55,62 persen dan Dokter sebesar 36,53 persen. Sementara itu, pemanfaatan tenaga kesehatan lainnya, yaitu dukun beranak/paraji sebagai penolong kelahiran sebanyak 5,40 persen.

<https://natunakab.bps.go.id>



3

Pendidikan

ANGKA PARTISIPASI MURNI



SMA/SMK/MA

71,72%



SMP/MTs

92,04%



SD/MI

98,93%

Pendidikan

Pendidikan memiliki peranan sangat strategis dalam keberhasilan pembangunan. Berbagai upaya telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Beberapa regulasi dan peraturan diterapkan untuk memajukan dunia pendidikan. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1), bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Hal ini menunjukkan tidak ada batasan apapun dalam mengenyam dunia pendidikan. Karena tujuan dari pendidikan adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan meningkatkan kesejahteraan warga negara secara keseluruhan.

Kemampuan Membaca dan Menulis

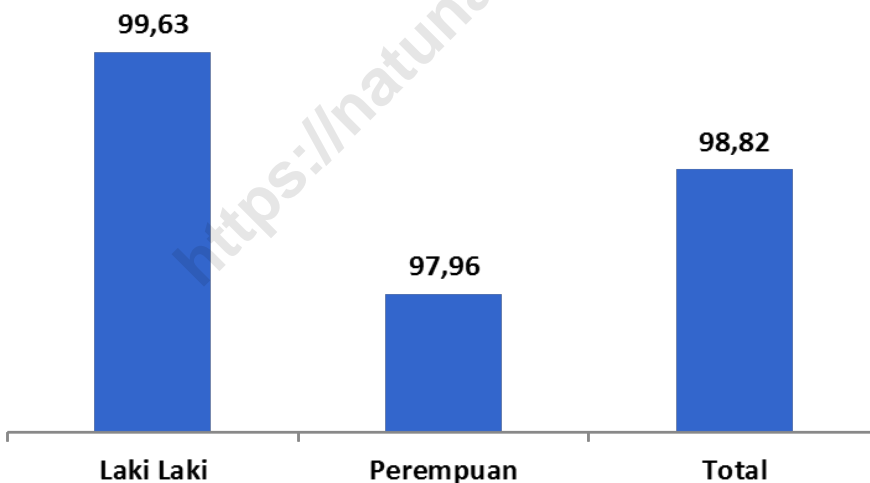
Kemampuan membaca dan menulis yang digambarkan dengan angka melek huruf tercakup dalam agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs Indonesia indikator 4.6.1.(a) dan 4.6.1.(b). Sebagai salah satu negara yang telah berkomitmen untuk turut serta melaksanakan TPB/SDGs hingga tahun 2030, pemerintah Indonesia kemudian menetapkan target capaian angka melek huruf pada RPJMN 2015-2019.

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2019, kemampuan membaca dan menulis telah dikuasai oleh hampir seluruh penduduk Kabupaten Natuna berusia 15 tahun ke atas. Hal ini dapat diamati dari angka

melek huruf baik perempuan maupun laki-laki yang mencapai lebih dari 90 persen.

Meskipun demikian, kemampuan membaca dan menulis perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2019, sebanyak 97,96 persen perempuan usia 15 tahun ke atas mampu membaca dan menulis huruf latin, arab, atau lainnya, sedangkan persentase laki-laki lebih tinggi yaitu 99,63 persen (Gambar 3.1).

Gambar 3.1 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Jenis Kelamin 2019



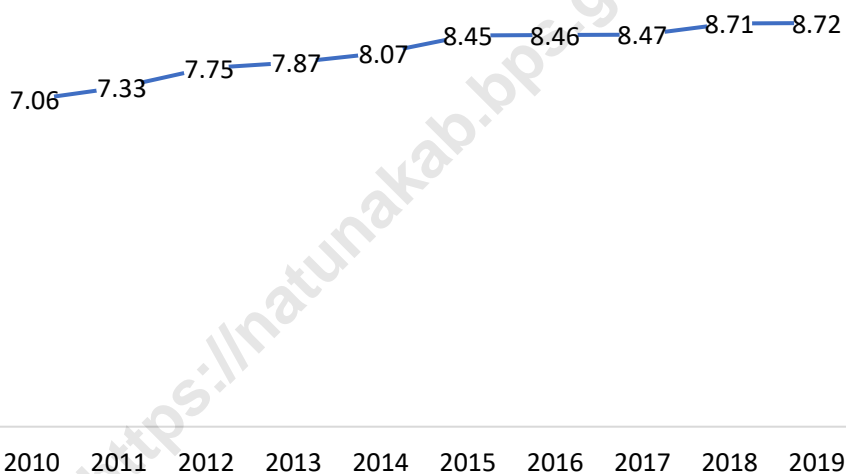
Sumber: BPS, Susenas 2019

Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 25 tahun ke atas untuk menempuh jenjang pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah

merupakan salah satu indikator untuk menggambarkan kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.

Gambar 3.2 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas di Kabupaten Natuna (tahun), 2019



Sumber : BPS, Susenas 2019

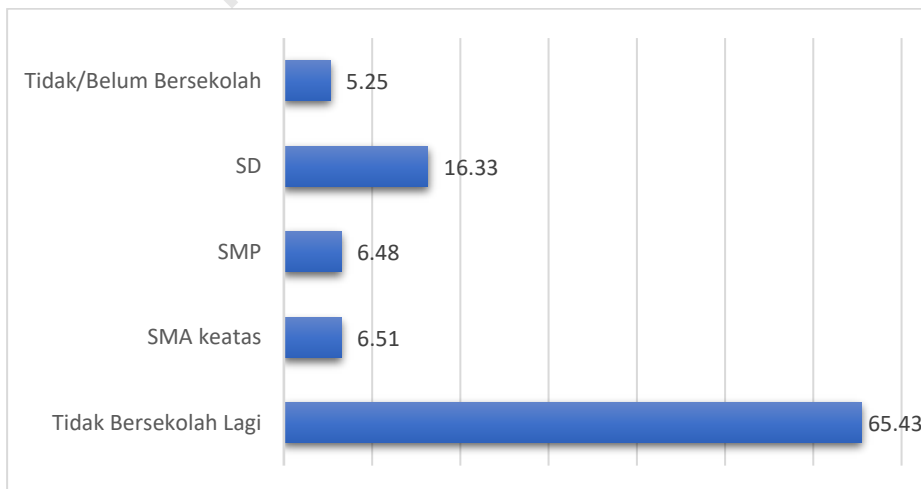
Secara umum, pada tahun 2019 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Natuna sebesar 8.72 tahun. Artinya, rata-rata penduduk Kabupaten Natuna hanya bersekolah hingga kelas VIII SMP. Selama periode tahun 2011-2019, rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Natuna mengalami peningkatan meskipun tidak besar. Pada tahun 2011 rata-rata lama sekolah mencapai 7,33 tahun kemudian meningkat menjadi 8,72 tahun pada tahun 2019.

Pendidikan Tertinggi Yang di Tamatkan

Tingkat pendidikan yang dapat ditamatkan oleh seseorang bisa mencerminkan tingkat intelektualitas orang tersebut dan juga dapat meningkatkan status sosial di masyarakat. Oleh karenanya makin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh seseorang maka kemampuan, wawasan, cara berfikir akan lebih luas dan maju.

Pada tahun 2019, penduduk Kabupaten Natuna yang berumur 5 tahun ke atas sebanyak 5,25 persen tidak/belum pernah sekolah. Mayoritas penduduk Kabupaten Natuna yang tidak bersekolah lagi (65,43 persen), kemudian diikuti dengan penduduk masih bersekolah SD/ sederajat sebanyak 16,33 persen. Sementara itu, penduduk yang masih bersekolah SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat masing-masing 6,48 persen dan 6,51 persen.

Gambar 3.3 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas menurut status pendidikan, 2019



Sumber : BPS, Susenas 2019

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk perempuan yang tidak mempunyai ijazah lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Tercatat sekitar 17,43 persen penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas tidak berijazah, sementara perempuan mencapai 21,56 persen. Pada jenjang pendidikan SD/MI, penduduk perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Meskipun demikian, untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat, SMA/MA keatas, penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut ijazah/STTB Tertinggi yang dimiliki dan Jenis Kelamin di Kabupaten Natuna (persen), 2019

Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
Tidak Mempunyai Ijazah	17,43	21,56
SD/MI	27,79	30,84
SMP/MTs	19,00	18,66
SMA/ keatas	35,78	28,95
Jumlah	100,00	100,00

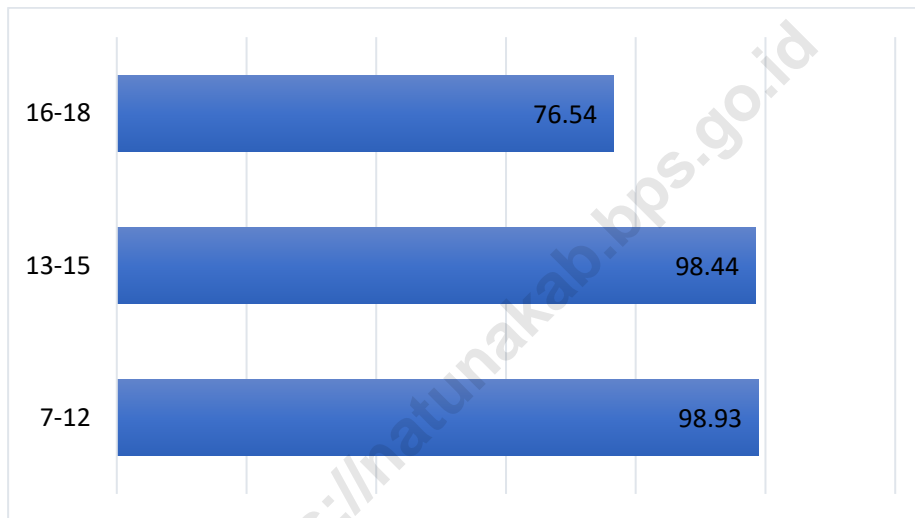
Sumber : BPS, Susenas 2019

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan. APS menggambarkan proporsi penduduk yang

masih sekolah dengan kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah oleh penduduk umur tertentu.

Gambar 3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Natuna, 2019



Sumber : BPS, Susenas 2019

Program wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Natuna belum sepenuhnya berhasil. Tercatat bahwa APS pada penduduk kelompok umur 13-15 tahun sebesar 98,44 persen. Dengan kata lain, masih terdapat 1,56 persen penduduk usia 13-15 tahun yang seharusnya sekolah ternyata tidak/belum pernah sekolah atau tidak bersekolah lagi.

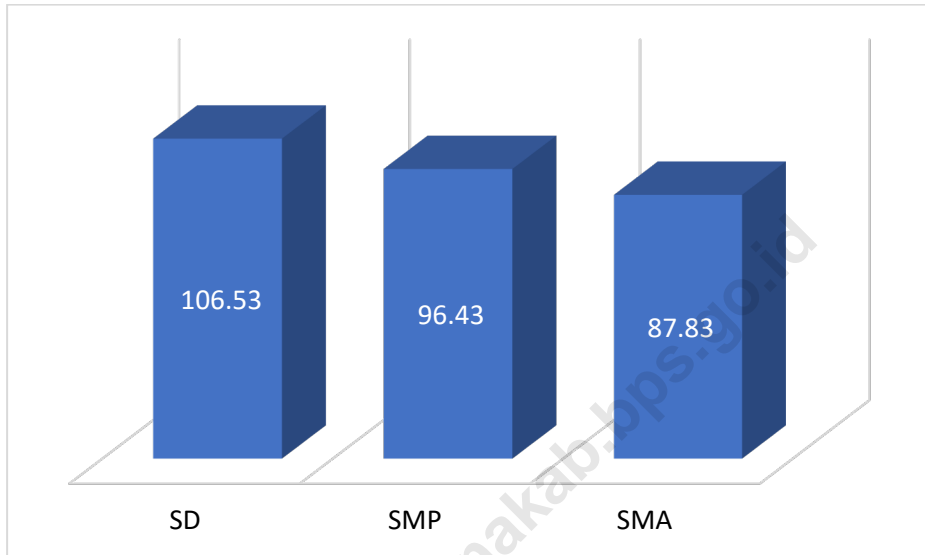
Pada penduduk kelompok umur 7-12 tahun atau setara dengan jenjang pendidikan SD sederajat mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, APS menunjukkan angka 98,93 persen. Pada

kelompok umur 16-18 tahun atau setara dengan jenjang pendidikan SMA sederajat sebesar 76,54 persen. Angka ini lebih kecil dibandingkan kelompok umur lainnya. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah angka partisipasi sekolahnya. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang melanjutkan sampai jenjang pendidikan tinggi hanya sebagian saja sedangkan penduduk lainnya berhenti sekolah atau putus sekolah atau tidak mampu melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi.

Angka Partisipasi Kasar (APK)

Indikator lain yang biasa digunakan untuk mengukur partisipasi sekolah adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK menggambarkan proporsi penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. APK bisa bernilai lebih dari 100 persen karena ada penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu ada yang di luar kelompok usia yang seharusnya. APK dapat mencerminkan penduduk pada kelompok umur tertentu yang masuk sekolah tidak tepat sesuai dengan umurnya.

Gambar 3.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Natuna, 2019



Sumber : BPS, Susenas 2019

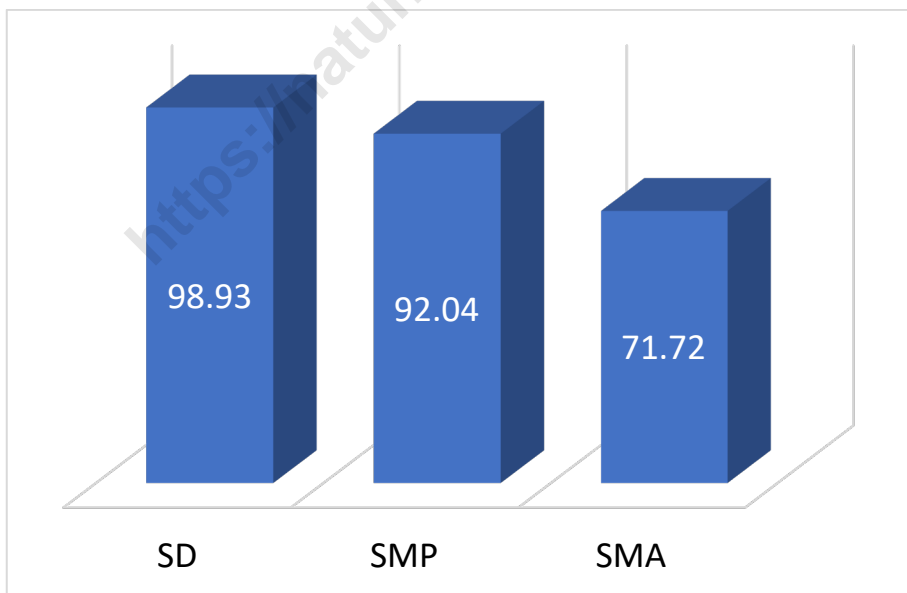
Secara umum, APK untuk jenjang pendidikan SD sederajat pada tahun 2019 sebesar 106,53 persen. Hal ini menunjukkan bahwa ada penduduk yang berumur diluar dari kelompok umur 7-12 tahun masih bersekolah di SD/sederajat. Hal ini umum terjadi karena masih ada penduduk yang berumur dibawah 7 tahun sudah bersekolah SD/sederajat, atau penduduk yang berusia diatas 12 tahun yang masih bersekolah SD/sederajat.

Pada jenjang pendidikan SMP/sederajat dan SMA/sederajat, APK pada tahun 2019 sebesar 96,43 serta 87,63 persen. Nilai dibawah 100 persen menunjukkan bahwa tidak semua penduduk pada kelompok umur tersebut bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai atau tidak bersekolah lagi.

Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah bersangkutan. Indikator APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu (usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya). APM akan mencapai nilai 100, jika seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Gambar 3.6 Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Natuna, 2019



Sumber : BPS, Susenas 2019

APM pada jenjang pendidikan masih belum mencapai angka 100 persen. Hal ini mencerminkan bahwa penduduk dengan umur

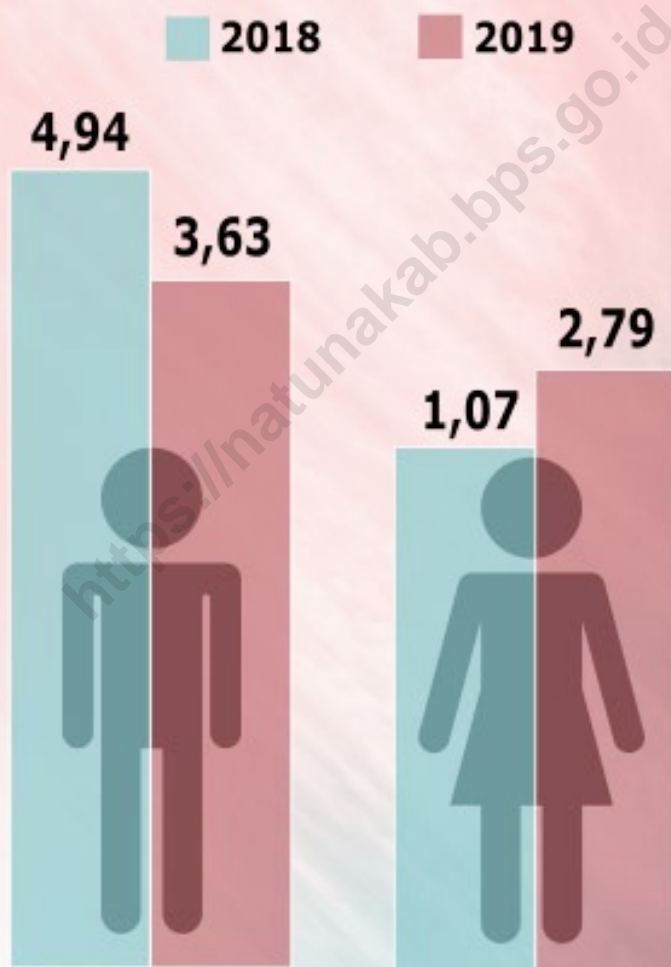
yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya. Pada tahun 2019 APM SD/Sederajat di Kabupaten Natuna sebesar 98,93 persen, artinya tidak seluruh anak usia 7-12 tahun yang masih sekolah dan atau bersekolah pada jenjang SD/Sederajat.

<https://natunakab.bps.go.id>



4

Ketenagakerjaan



**TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA
MENURUT JENIS KELAMIN (%)**

Ketenagakerjaan

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu permasalahan pokok yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Permasalahan yang timbul ialah besarnya jumlah angkatan kerja dan memiliki kecenderungan selalu meningkat. Hal ini sejalan dengan transisi demografi yang tengah berlangsung di negeri ini, yaitu semakin menurunnya angka kelahiran maupun angka kematian. Transisi demografi ini menyebabkan komposisi penduduk sedemikian rupa sehingga penduduk usia produktif meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Sehubungan dengan itu, pengelolaan ketenagakerjaan sebagai sumber daya pembangunan merupakan hal yang sangat penting mendapat perhatian, karena untuk mencapai tujuan pembangunan nasional diperlukan segala sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia.

Tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi merupakan sejumlah orang yang ikut serta dalam kegiatan produksi pada masing-masing sektor ekonomi. Namun, besarnya persentase penduduk yang telah bekerja belum merupakan satu ukuran dalam menentukan apakah masalah ketenagakerjaan dapat dikatakan berhasil. Banyak faktor yang mempengaruhi aspek ketenagakerjaan pada suatu daerah. Selain banyaknya penduduk yang telah terserap

dalam kegiatan ekonomi, kualitas dari tenaga kerja tersebut juga akan mempengaruhi *output* produksi.

Adapun klasifikasi seseorang dikatakan telah memasuki usia kerja yaitu ketika seseorang tersebut telah berusia 15 tahun atau lebih. Manakala seseorang tersebut terlibat dalam suatu pekerjaan atau terkategori sebagai pengangguran, maka seseorang itu termasuk dalam angkatan kerja. Yang dimaksud dengan pengangguran di sini ialah seseorang yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha, sudah merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, atau sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Angkatan Kerja

Kedaaan ketenagakerjaan di Kabupaten Natuna pada Agustus 2019 menunjukkan adanya 3,3 persen angkatan kerja yang masih menganggur. Sementara itu, 96,7 persen lainnya sudah bekerja. Angkatan kerja laki-laki lebih banyak dibandingkan angkatan kerja perempuan.

Tabel 4.1 Angkatan Kerja di Kabupaten Natuna (persen), 2019

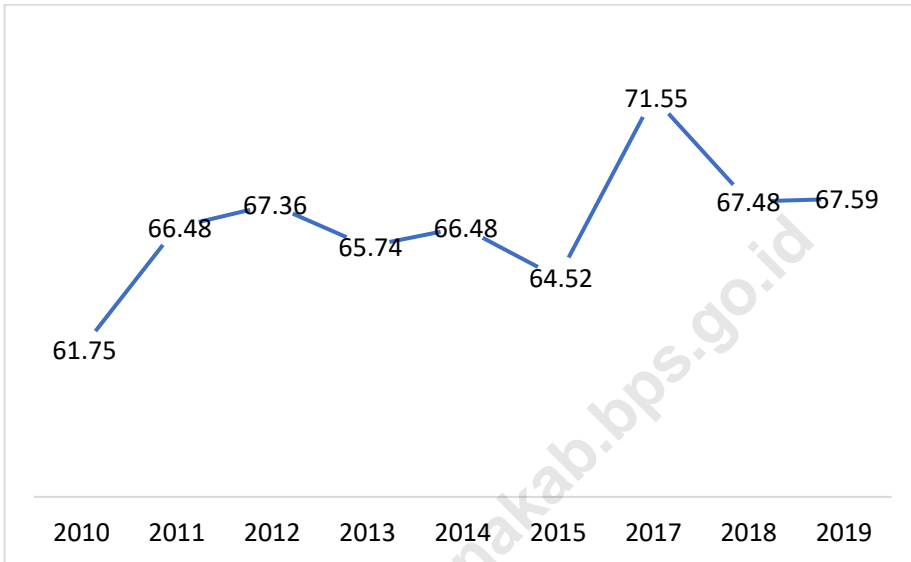
Ketenaga kerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja	23.491	12.989	36.480
Bekerja	22.638	12.627	35.265
Pengangguran	853	362	1215

Sumber: BPS, Sakernas 2019

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk ke dalam angkatan kerja, yakni mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) melakukan aktivitas bekerja atau mencari pekerjaan. Data hasil Sakernas menunjukkan bahwa TPAK di Kabupaten Natuna mengalami penurunan dari 71,55 persen pada Agustus tahun 2017 menjadi 67,48 persen pada Agustus tahun 2018 dan mengalami kenaikan menjadi 67,59 persen pada Agustus tahun 2019.

Gambar 4.1 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Natuna, 2010-2019



*Tahun 2016 tidak ada estimasi untuk tingkat Kabupaten

Sumber: BPS, Sakernas 2019

Penduduk yang Bekerja

Dari sebanyak 53.969 jiwa penduduk usia 15 tahun ke atas (tenaga kerja) pada Agustus 2019 di Kabupaten Natuna, terdapat sebanyak 67,59 persen yang bekerja. Kondisi ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Agustus tahun 2018, dimana persentase penduduk yang bekerja adalah 64,78 persen.

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Natuna, 2019

Jenis Kegiatan	Persentase (%)
(1)	(2)
Angkatan Kerja	67.59
1.1 Bekerja	65.34
1.2 Pengangguran	2.25
Bukan Angkatan Kerja	32.41
2.1 Sekolah	7.65
2.2 Mengurus Rumah Tangga	21.55
2.3 Lainnya	3.21
Jumlah	100

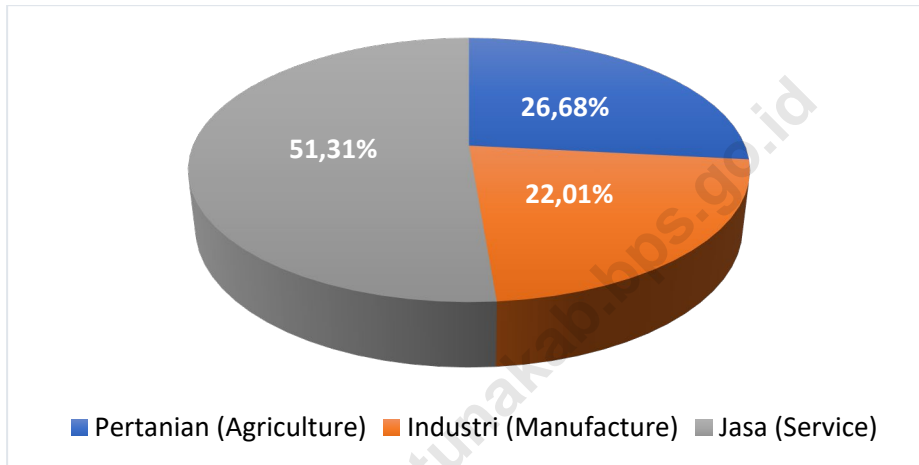
Sumber: BPS, Sakernas 2019

Lapangan Pekerjaan

Komposisi penyebaran jumlah pekerja di suatu wilayah menurut lapangan pekerjaannya menunjukkan pada sisi mana kegiatan ekonomi wilayah tersebut bertumpu. Lapangan usaha penduduk yang bekerja dibagi dalam tiga kelompok yaitu Pertanian (*Agriculture*), Industri (*Manufacture*), dan Jasa (*Service*). *Agriculture* terdiri atas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan. *Manufacture* terdiri atas Pertambangan dan Penggalian; Industri; Listrik, Gas, dan Air; serta Konstruksi. Sedangkan *Service* terdiri atas Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi; Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi; Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha

Persewaan, dan Jasa Perusahaan; serta Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan.

Gambar 4.2 Distribusi Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Natuna, 2019



Sumber: BPS, Sakernas 2019

Kabupaten Natuna yang sebagian besar daerahnya merupakan daerah perdesaan nyatanya didominasi oleh sektor jasa dan pertanian. Pada kedua sektor tersebut, persentase tenaga kerja yang terserap masing-masing sebesar 51,31 persen pada sektor jasa dan 26,28 persen pada sektor pertanian. Sementara itu, persentase tenaga kerja pada sektor industri sebesar 22,01 persen.

Sektor jasa menempati urutan pertama dalam penyerapan tenaga kerja dikarenakan sebagian besar penduduk di Kabupaten Natuna banyak mengandalkan sektor perdagangan dan jasa-jasa sebagai mata pencarian pokoknya. Sementara itu, sektor pertanian hanya menempati urutan kedua dalam proses penyerapan tenaga

kerja. Di sisi lain, kurangnya penyerapan tenaga kerja pada sektor industri dikarenakan masih minimnya jumlah industri yang ada di Kabupaten Natuna.

Status Pekerjaan

Secara sederhana kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh kategori status pekerjaan utama, pekerja formal mencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, sisanya termasuk pekerja informal. Berdasarkan identifikasi ini, maka pada Agustus 2019 ada sebesar 50,55 persen dari total penduduk yang bekerja yang termasuk dalam pekerja formal. Sedangkan, 49,45 persen sisanya merupakan pekerja informal.

Tabel 4.3 Distribusi Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Natuna, 2019

Status Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha Sendiri	20.80	10.18	30.98
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap	3.78	3.08	6.87
Berusaha Dibantu Buruh Tetap	2.96	1.18	4.14
Buruh	30.41	16.03	46.44
Pekerja Bebas	5.30	0.44	5.74

Pekerja Keluarga	0.94	4.89	5.84
Total	64.19	35.81	100

Sumber: BPS, Sakernas 2019

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2019 yang dapat dilihat pada tabel di atas, sebagian besar pekerja berstatus sebagai buruh/karyawan, dengan persentase mencapai 46,44 persen. Urutan terbesar kedua dari status pekerjaan utama penduduk yang bekerja di Kabupaten Natuna adalah berusaha sendiri, yaitu sebesar 30,98 persen.

Persentase pekerja tak dibayar/pekerja keluarga ternyata lebih banyak didominasi oleh pekerja perempuan dari pada pekerja laki-laki, yaitu 4,89 persen berbanding 0,94 persen. Hal ini disebabkan karena mayoritas penduduk perempuan berada di rumah, dan untuk mendukung suaminya, mereka membantu pekerjaan suaminya di rumah.

Tingkat Pengangguran

Salah satu permasalahan ketenagakerjaan yang sedang dihadapi Indonesia yaitu peningkatan penawaran tenaga kerja yang tidak diikuti oleh kesempatan kerja. Demikian pula yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Kabupaten Natuna, kondisi tersebut tidak jauh berbeda. Sebagai dampak yang dihasilkannya, kelebihan penawaran tenaga kerja tersebut memunculkan pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Natuna pada tahun 2019 mencapai 3,33 persen. Nilai ini mengalami penurunan dari tahun 2017. Jika dirinci menurut jenis kelamin, TPT penduduk laki-laki lebih tinggi jika dibandingkan dengan TPT penduduk perempuan. Pada tahun 2019, TPT penduduk laki-laki adalah 3,63 persen sedangkan TPT penduduk perempuan hanya sebesar 2,79 persen.

Tabel 4.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Natuna, 2019

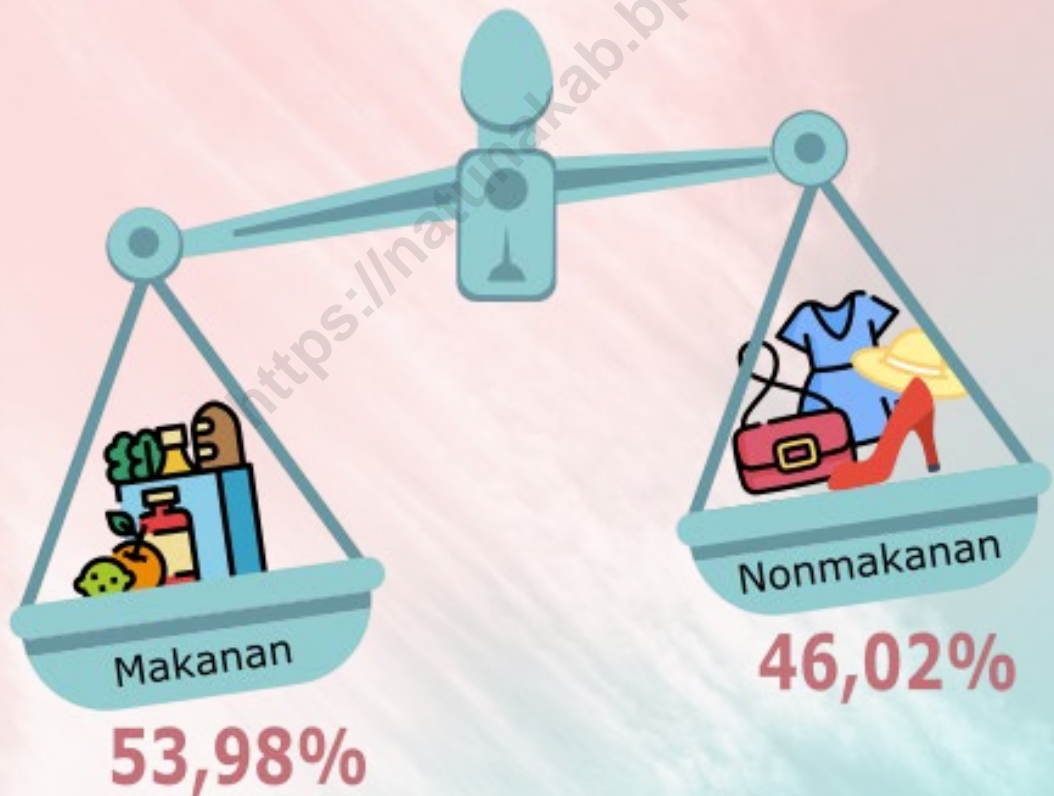
Jenis Kelamin	Agust-17	Agust-18	Agust-19
(1)	(2)	(3)	(4)
Laki-Laki (L)	3,79	4,94	3,63
Perempuan (P)	4,55	1,07	2,79
L+P	4,07	3,52	3,33

Sumber : BPS, Sakernas 2019



5 Taraf dan Pola Konsumsi

PROPORSI PENGELUARAN MENURUT JENIS PENGELUARAN



Pengeluaran Makanan di Kabupaten Natuna lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran Nonmakanan.

Taraf dan Pola Konsumsi

Pola Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator sosial ekonomi yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan ekonomi. Secara umum, pola konsumsi dapat digambarkan melalui proporsi pengeluaran yang dibedakan menjadi pengeluaran makanan dan bukan makanan. Pengeluaran tersebut dipengaruhi oleh besarnya pendapatan. Terdapat kecenderungan bahwa dengan meningkatnya pendapatan, terdapat pergeseran pola konsumsi makanan ke bukan makanan.

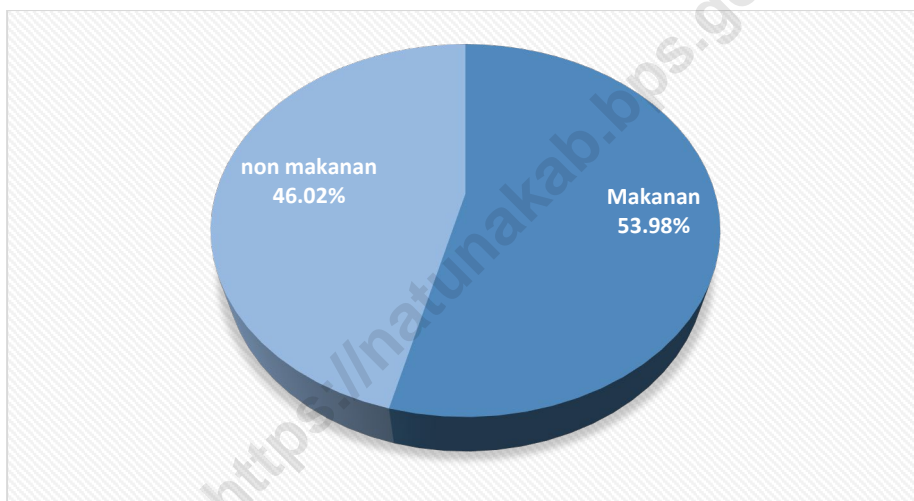
Pengeluaran Rumah Tangga

Determinan dari kesejahteraan ekonomi adalah daya beli penduduk. Penurunan daya beli akan mengurangi kemampuan pemenuhan kebutuhan pokok. Semakin tinggi pengeluaran rumah tangga menunjukkan semakin tinggi daya beli rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan.

Pola konsumsi rumah tangga akan bergeser seiring dengan bertambahnya pendapatan rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka akan terjadi pergeseran pola konsumsi yaitu dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran ini terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan umumnya rendah, dan sebaliknya, permintaan terhadap barang non

makanan umumnya meningkat. Pada kelompok penduduk tertentu, tingkat konsumsi makanannya akan mencapai titik jenuh, sehingga ketika terjadi peningkatan pendapatan maka akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan, dan sisanya dialihkan ke tabungan maupun investasi.

Gambar 5.1 Persentase Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Natuna (persen), 2019



Sumber: BPS, Susenas 2019

Hasil Susenas 2019 menunjukkan bahwa secara umum pengeluaran penduduk Kabupaten Natuna masih didominasi oleh pengeluaran makanan. Dari pengeluaran rata-rata per kapita penduduk Kabupaten Natuna selama sebulan, 53,98 persennya digunakan untuk pengeluaran makanan, sedangkan untuk bukan makanan sebesar 46,02 persen.

Tabel 5.1 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan menurut Kelompok Makanan di Kabupaten Natuna (rupiah), 2019

Kelompok Makanan	Pengeluaran
(1)	(2)
Padi-padian	70.313
Umbi-umbian	6.319
Ikan	68.028
Daging	11.764
Telur dan Susu	35.561
Sayur-sayuran	46.465
Kacang-kacangan	7.723
Buah-buahan	27.164
Minyak dan Lemak	16.956
Bahan Minuman	24.277
Bumbu-bumbuan	16.963
Konsumsi Lainnya	16.137
Makanan dan minuman jadi	168.002
Tembakau dan sirih	84.423
Total	600.094

Sumber: BPS, Susenas 2019

Pada kelompok pengeluaran makanan, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan dan minuman jadi merupakan konsumsi terbesar. Porsinya mencapai 15,11 persen terhadap total pengeluaran makanan. Tingginya pengeluaran untuk konsumsi makanan dan minuman jadi dibandingkan komoditi-komoditi makanan lainnya menggambarkan bahwa pola konsumsi penduduk sudah beralih dari makanan yang dimasak di rumah ke makanan dan minuman jadi yang tersedia di warung makan/rumah makan.

Pengeluaran terbesar kedua adalah tembakau dan sirih, yang menyiratkan banyaknya perokok di Kabupaten Natuna. Porsi terbesar konsumsi makanan berikutnya adalah padi-padian dan ikan yaitu sebesar 6,32 persen dan 6,12 persen. Hal ini menunjukkan bahwa selain mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok, masyarakat Kabupaten Natuna banyak mengonsumsi ikan. Selanjutnya adalah sayur-sayuran sebesar 4,18 persen diikuti telur dan susu sebesar 3,20 persen. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran lainnya seperti buah-buahan, daging, bahan minuman, konsumsi lainnya, kacang-kacangan, dan umbi-umbian lainnya bila ditotal nilainya sebesar 10,88 persen terhadap total pengeluaran makanan.

Pada kelompok pengeluaran bukan makanan, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk perumahan, bahan bakar, penerangan, dan air merupakan konsumsi terbesar yaitu sebesar 25,24 persen. Pengeluaran terbesar berikutnya pada kelompok bukan makanan adalah pengeluaran untuk aneka barang dan jasa mencapai 12,17 persen. Sementara itu, pengeluaran untuk pakaian, alas kaki, dan tutup kepala sebesar 3,16 persen, kemudian pengeluaran untuk pajak pemakaian dan premi asuransi sebesar 2,89 persen, lalu diikuti barang tahan lama sebesar 2,17 persen, dan yang terakhir dan paling kecil adalah pengeluaran untuk pesta dan upacara yaitu sebesar 0,39 persen.

Tabel 5.2 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan menurut Kelompok Bukan Makanan di Kabupaten Natuna (rupiah), 2019

Kelompok Bukan Makanan	Pengeluaran
(1)	(2)
Perumahan, bahan bakar, penerangan, air	280.644
Aneka barang dan jasa	135.260
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	35.176
Barang yang tahan lama	24.109
Pajak pemakaian dan premi asuransi	32.146
Keperluan pesta dan upacara	4.366
Total	511.702

Sumber: BPS, Susenas 2019



6

Perumahan dan Lingkungan

17,39%

rumah tangga menggunakan leding untuk sumber air minum.



62,92%

rumah tangga menggunakan minyak tanah untuk bahan bakar memasak.



87,82%

rumah tangga memiliki bangunan tempat tinggal berstatus milik sendiri



97,94%

rumah tangga menggunakan sumber penerangan listrik



Perumahan dan Lingkungan

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia selain sandang dan pangan. Manusia membutuhkan tempat berlindung dari panas, hujan, dan keberadaannya sangat penting untuk dapat terus bertahan hidup. Rumah merupakan tempat berlindung yang memberikan rasa aman bagi penghuninya. Selain itu, manusia juga merupakan makhluk sosial yang secara alamiah memiliki keinginan untuk hidup bersama orang lain dan bergantung satu sama lain, sehingga terbentuklah suatu komunitas yang terdiri dari beberapa bangunan rumah tinggal yang membentuk permukiman penduduk.

Rumah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan pemiliknya. Semakin baik fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin baik juga tingkat kesejahteraan rumah tangga. Sebagai salah satu kebutuhan dasar, idealnya rumah dapat dimiliki oleh setiap keluarga, dengan kriteria rumah layak huni dan terjangkau yang berada di kawasan permukiman yang aman, harmonis, sehat, dan berkelanjutan.

Menurut Permenpera Nomor 22 Tahun 2008, rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Lingkungan yang sehat dan aman serta didukung sarana, prasarana, dan utilitas umum menjadi salah satu kriteria rumah layak huni.

Untuk melihat sejauh mana pencapaian pembangunan perumahan, diperlukan beberapa indikator yang dapat diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) di antaranya jenis atap terluas, jenis dinding terluas, luas lantai, fasilitas perumahan (sumber air minum, penerangan, dan sanitasi), serta kepemilikan rumah.

Kualitas Rumah Tinggal

Rumah dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan maka akan semakin baik kualitas atau kondisi rumah yang ditinggali. Salah satu kualitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah adalah kualitas material seperti jenis atap, jenis dinding dan jenis lantai terluas yang digunakan.

Tabel 6.1 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Atap Terluas di Kabupaten Natuna (persen), 2019

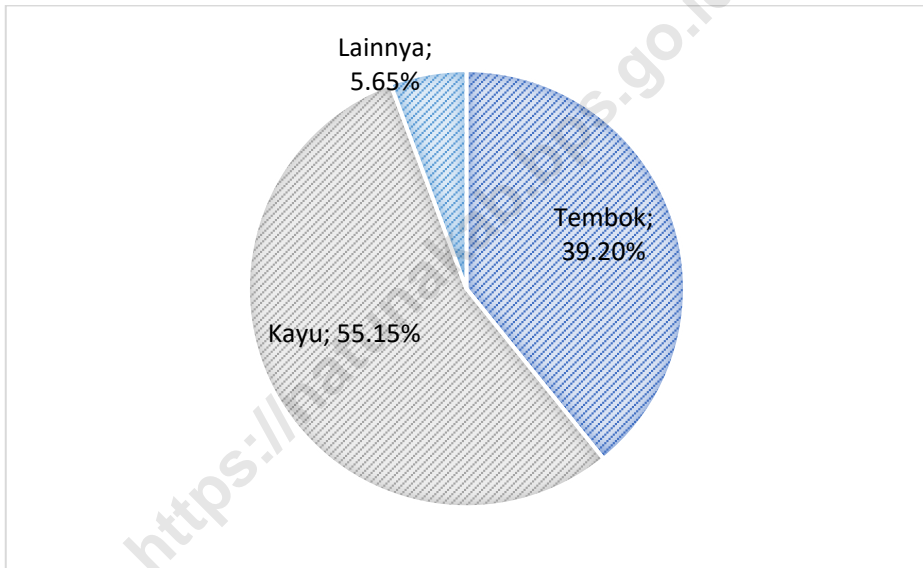
Jenis Atap Terluas	Persentase (%)
(1)	(2)
Beton	1,23
Genteng	0,59
Asbes	45,38
Seng	50,07
Lainnya	2,73

*Lainnya termasuk Bambu, Kayu/sirap, Jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia,dll
Sumber: BPS, Susenas 2019

Hasil Susenas 2019 menunjukkan bahwa seng merupakan jenis atap yang paling banyak digunakan, yaitu 50,07 persen. Berikutnya, 45,39 persen menggunakan asbes sebagai atap terluas rumah mereka.

Selanjutnya adalah jenis atap lainnya sebesar 2,73 persen (bambu, kayu/sirap, jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia, dll). Jenis atap selanjutnya adalah beton sebesar 1,23 persen kemudian yang terakhir adalah jenis atap genteng yaitu sebesar 0,59 persen.

Gambar 6.1 Persentase Rumah Tangga menurut jenis Dinding Terluas di Kabupaten Natuna (persen), 2019



*Lainnya termasuk plesteran anyaman bambu/kawat,bambu, dll
Sumber: BPS, Susenas 2019

Selain jenis atap terluas, jenis dinding terluas juga dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Natuna menggunakan jenis dinding kayu sebagai dinding terluas rumah mereka, yaitu sebesar 55,15 persen. Hal ini menunjukkan bahwa banyak rumah tangga di Kabupaten Natuna yang menggunakan rumah tradisional setempat yaitu rumah panggung yang berdinding kayu. Jenis dinding dinding terluas selanjutnya adalah tembok yaitu sebesar 39,20 persen.

Sementara itu, dinding lainnya (plesteran, anyaman bambu/kawat, bambu, dll) sebanyak 5,65 persen.

Sementara itu jika dilihat berdasarkan jenis lantai terluas, Sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Natuna menggunakan lantai kayu/papan yaitu sebesar 52,16 persen yang menunjukkan bahwa banyak rumah tangga di Kabupaten Natuna yang menggunakan rumah tradisional setempat yaitu rumah panggung yang berlantai kayu. Selanjutnya diikuti lantai keramik sebesar 27,83 persen, diikuti oleh lantai semen/bata merah sebesar 19,05 persen. Rumah tangga yang berlantainya bambu, tanah, dan lainnya masih ada tetapi proporsinya kecil, yaitu 0,95 persen.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Lantai Terluas di Kabupaten Natuna (persen), 2019

Jenis Lantai Terluas	Persentase (%)
(1)	(2)
Marmer/granit	0,00
Keramik	27,83
Kayu/papan	52,16
Semen/Bata merah	19,05
Lainnya (bambu, tanah, dll)	0,95

Sumber: BPS, Susenas 2019

Fasilitas Rumah Tinggal

Fasilitas rumah tinggal yang memadai menjadi syarat terpenuhinya rumah layak huni. Dengan fasilitas yang baik diharapkan

tercipta kenyamanan dan kebersihan bagi rumah tinggal. Beberapa fasilitas yang paling mendasar agar rumah tinggal menjadi nyaman dan sehat adalah tersedianya listrik, sumber air minum yang digunakan dan jamban dengan tangki septik.

Sumber penerangan merupakan salah satu fasilitas perumahan yang mendasar. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan Non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibanding sumber penerangan lainnya. Masih ada 0,52 persen rumah tangga di Kabupaten Natuna yang menggunakan sumber penerangan bukan listrik. Meskipun kecil, tetapi menunjukkan bahwa masih ada rumah tangga yang belum menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Sementara itu, ada 1,74 persen rumah tangga yang sumber penerangan utamanya listrik bukan PLN. Statistik di atas menunjukkan bahwa program pembangunan dalam hal ketersediaan listrik belum menjangkau semua rumah tangga di Kabupaten Natuna.

Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Penerangan di Kabupaten Natuna (persen), 2019

Sumber Penerangan	Persentase (%)
(1)	(2)
Listrik PLN	97,74
Listrik Non PLN	1,74
Bukan Listrik	0,52

Sumber: BPS, Susenas 2019

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi penduduk dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan air bersih dalam jumlah yang cukup memadai terutama untuk keperluan minum dan masak, merupakan salah satu tujuan program pembangunan yang menempati skala prioritas. Air bersih mencakup air kemasan, air isi ulang, air leding, air pompa, air sumur terlindung, dan air yang bersumber dari mata air yang jaraknya lebih dari 10 meter dari pembuangan akhir tinja.

Tabel 6.4 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum Utama di Kabupaten Natuna (persen), 2019

Sumber Air Minum	Persentase (%)
(1)	(2)
Air kemasan/isi ulang	41,6
Leding	17,39
Sumur bor/pompa	1,75
Sumur/mata air terlindung	17,01
Sumur/mata air tak terlindung	22,17
Lainnya	0,08

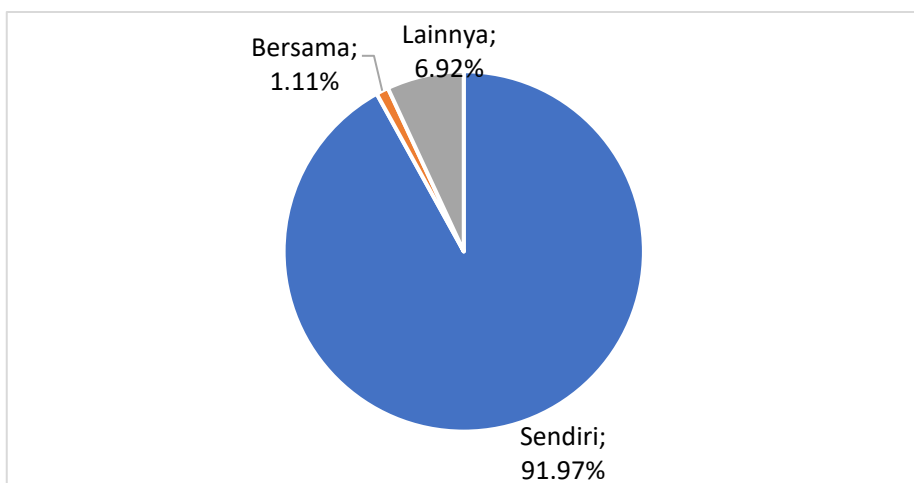
Lainnya termasuk air permukaan (sungai, danau, waduk, kolam, irigasi), air hujan, dll
 Sumber: BPS, Susenas 2019

Berdasarkan Susenas 2019, terdapat sekitar 77,75 persen rumah tangga di Kabupaten Natuna yang telah menikmati air bersih sebagai air minum utama (air kemasan/isi ulang, leding, sumur bor/pompa,

sumur/mata air terlindung termasuk dalam kategori air bersih) Sedangkan 22,25 persen rumah tangga masih belum menikmati air minum bersih. Sumber air minum utama yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga di Kabupaten Natuna adalah air kemasan/isi ulang yaitu sebanyak 41,60 persen. Persentase terbesar kedua adalah rumah tangga dengan sumber air minum utama berasal dari sumur/mata air tak terlindung yaitu sebesar 22,17 persen.

Ketersediaan kloset sendiri dengan menggunakan tangki septik merupakan fasilitas rumah tangga yang cukup penting karena berkaitan dengan kesehatan. Sistem pembuangan kotoran manusia yang tidak tertangani dengan baik akan memengaruhi kondisi lingkungan terutama tanah dan sumber air, Selain itu, terdapat resiko terhadap penularan berbagai macam penyakit seperti penyakit saluran pencernaan.

Gambar 6.2 Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kabupaten Natuna (persen), 2019

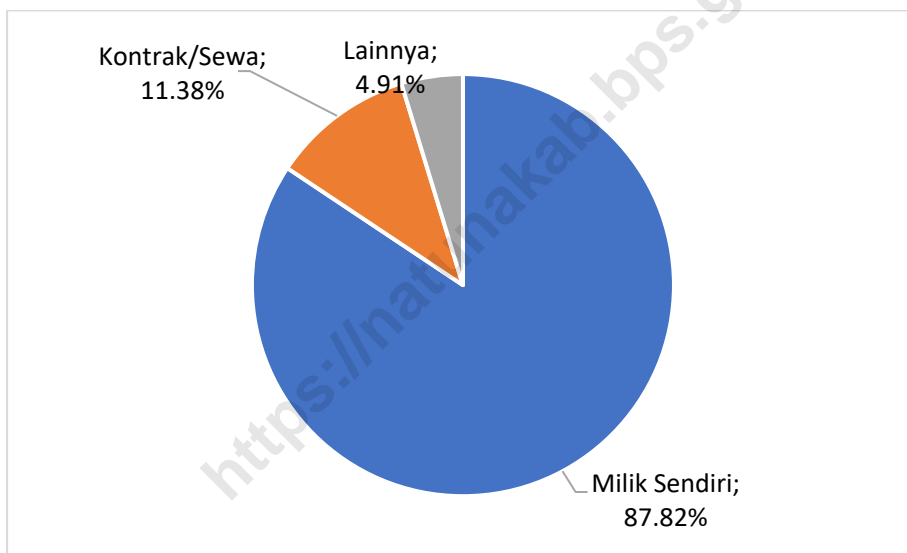


Sumber: BPS, Susenas 2019

Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Status kepemilikan rumah tinggal dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu milik sendiri, kontrak/sewa, dan lainnya (bebas sewa, dinas, dll). Secara umum, rumah tinggal yang ditempati oleh rumah tangga di Kabupaten Natuna berstatus milik sendiri.

Gambar 6.3 Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal di Kabupaten Natuna (persen), 2019



*) Lainnya termasuk rumah bebas sewa, rumah dinas, rumah adat, dll
Sumber: BPS, Susenas 2019

Hasil Susenas 2019 mencatat bahwa terdapat sekitar 87,82 persen rumah tangga tinggal di rumah milik sendiri. Rumah tangganya menempati rumah dengan status kontrak/sewa sebanyak 11,38 persen, dan lainnya (rumah bebas sewa, rumah dinas, rumah adat, dll) sebesar 4,91 persen.



7

Kemiskinan

2017



332.248

2018



362.519

2019



378.573

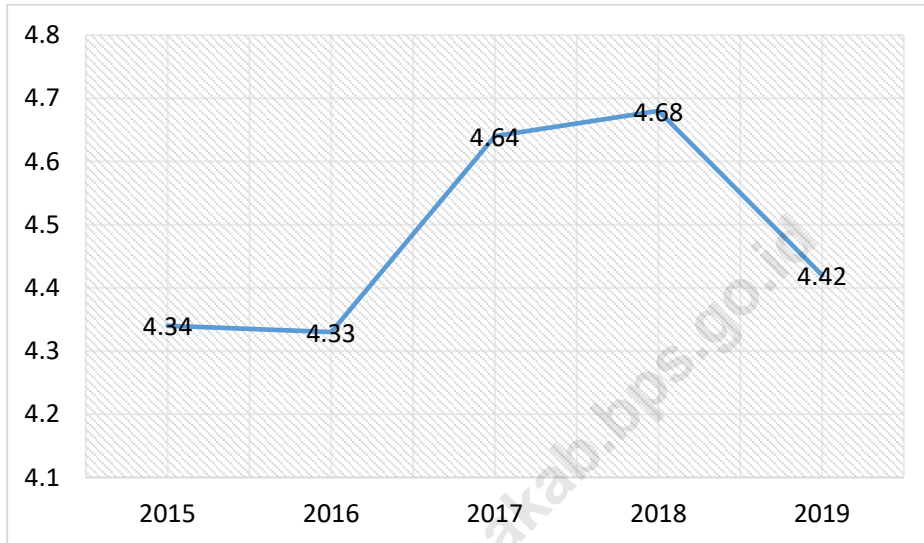
**GARIS KEMISKINAN (RUPIAH/KAPITA/BULAN)
KABUPATEN NATUNA**

Perkembangan Penduduk Miskin

Dalam berbagai literatur, kemiskinan selalu didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, seperti: sandang, pangan, papan, Kesehatan, dan pendidikan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, maka kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Berdasarkan hasil Susenas yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2019, sebanyak 4,42 persen penduduk Kabupaten Natuna dapat digolongkan sebagai penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Natuna mengalami penurunan jika dibandingkan dengan bulan Maret tahun 2018, yaitu dari 3600 menjadi 3430 orang.

Gambar 7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Natuna (persen), 2015-2019

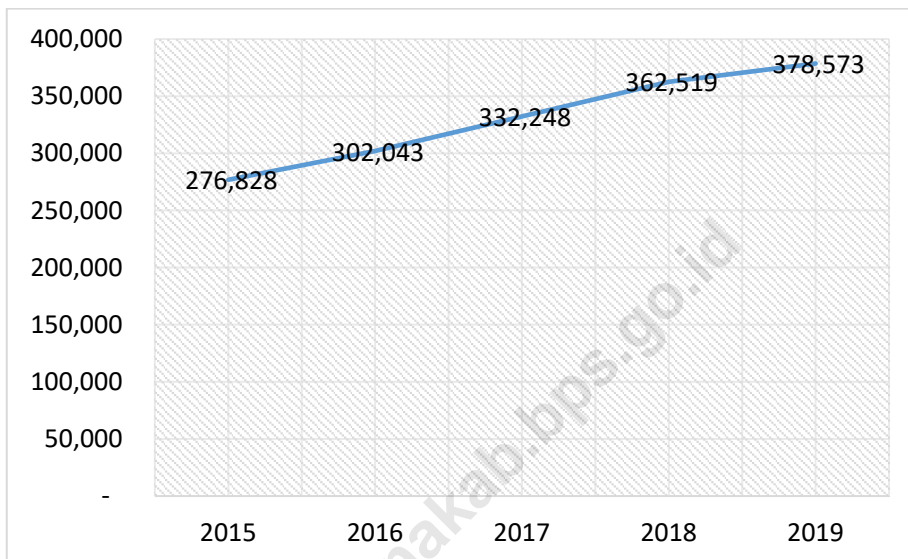


Sumber: BPS, Susenas 2019

Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan absolut pada umumnya diukur dengan menggunakan Garis Kemiskinan (GK). Banyak sedikitnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK. Selama periode Maret 2018-Maret 2019, pertumbuhan GK sebesar 4,4 persen, yaitu dari Rp 362.519 Per kapita per bulan menjadi Rp 378.573 per kapita per bulan.

Gambar 7.2 Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Natuna (ribu rupiah), 2015-2019



Sumber: BPS, Susenas 2019

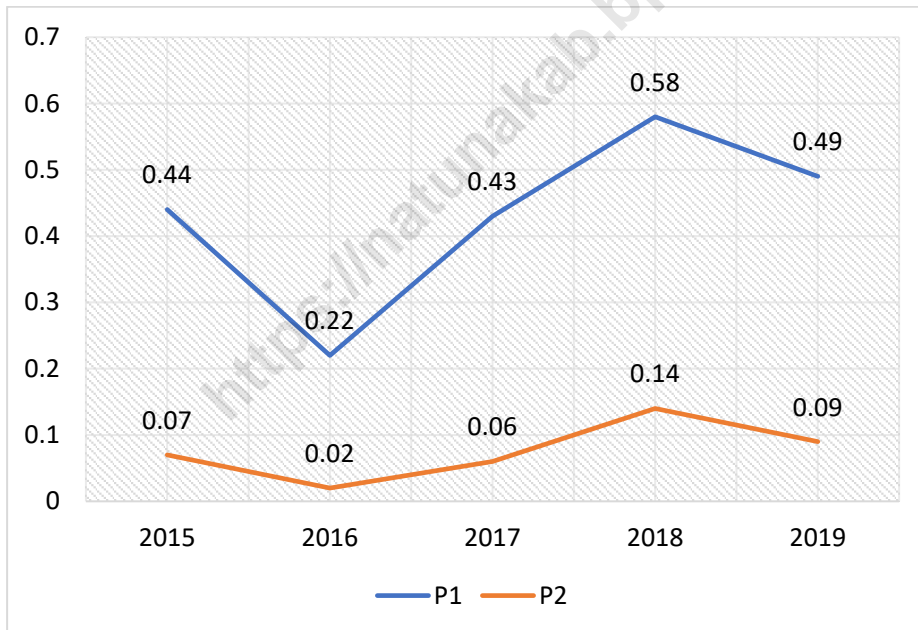
Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Kemiskinan tidak dilihat hanya dari jumlah dan persentase penduduk miskin, namun ada dimensi lainnya yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, kebijakan pengentasan kemiskinan juga harus mampu mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Selama tahun 2015-2016, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan adanya penurunan. Namun pada tahun 2017-2018, P1 dan P2 menunjukkan adanya peningkatan. P1 mengalami peningkatan dari 0,22 pada tahun

2016 menjadi 0,43 pada tahun 2017. Begitu juga dengan P2 yang mengalami peningkatan dari 0,02 pada tahun 2016 menjadi 0,06 pada tahun 2017. Kemudian, pada tahun 2018 P1 meningkat menjadi 0,58 begitu juga dengan P2 yang meningkat menjadi 0,14. Pada tahun 2019, terdapat penurunan pada P1 dan P2, dimana P1 turun dari 0,58 menjadi 0,49 kemudian P2 turun dari 0,14 menjadi 0,09.

Gambar 7.3 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Natuna (ribu rupiah), 2015-2019



Sumber: BPS, Susenas



8

Sosial Lainnya



Ada sebanyak **42,33%** penduduk berusia 5 tahun ke atas yang mengakses internet.

Sosial Lainnya

Kesejahteraan penduduk dapat dicerminkan melalui kegiatan-kegiatan sosial lainnya selain yang telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya. Aspek-aspek tersebut diantaranya adakah kepemilikan telepon seluler/nirkabel, akses terhadap internet, penerimaan program perlindungan sosial, kepemilikan jaminan sosial, dan kepemilikan aset.

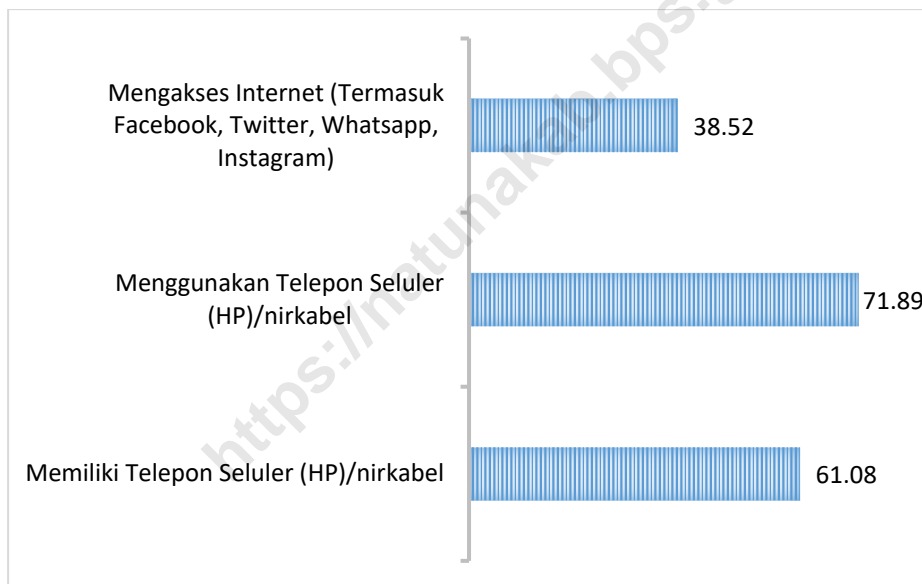
Penggunaan Teknologi Informasi

Kemajuan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) merupakan alat yang sangat penting untuk mewujudkan bangsa yang cerdas dan maju. Kemajuan tersebut dapat memberikan manfaat besar bagi pendidikan, penelitian, perdagangan, dan aspek kehidupan lainnya yang pada akhirnya dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2019, terdapat 71,9 persen rumah tangga yang menggunakan telepon seluler (HP)/nirkabel. Namun, hanya ada 61,1 persen rumah tangga yang memiliki telepon seluler (HP)/nirkabel yang mengindikasikan bahwa masih ada penduduk yang menggunakan telepon seluler (HP)/nirkabel yang bukan miliknya atau meminjam milik orang lain.

Pada tahun 2019, hanya terdapat 38,5 persen penduduk yang mengakses internet. Hal ini terjadi karena belum meratanya pembangunan jaringan telekomunikasi dan informasi terutama internet di Kabupaten Natuna yang terkendala letak geografisnya yaitu kepulauan.

Gambar 8.1 Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas menurut Penggunaan Teknologi Informasi selama Tiga Bulan Terakhir, 2019



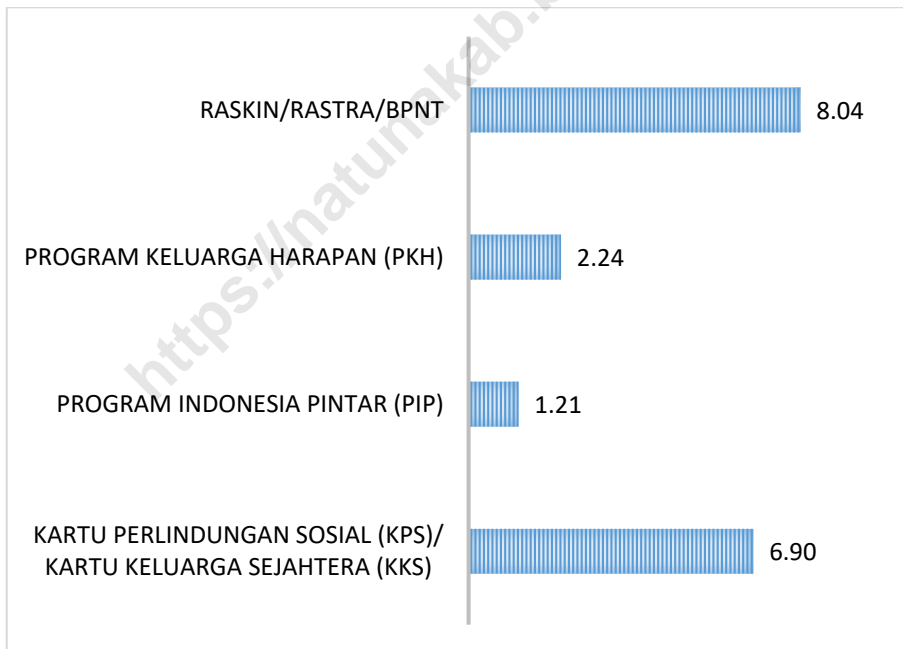
Sumber: BPS, Susenas 2019

Program Perlindungan Sosial

Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai

dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial memberikan akses pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak dasar manusia, termasuk akses pada pendapatan, kehidupan, pekerjaan, kesehatan dan pendidikan, gizi dan tempat tinggal. Selain itu, perlindungan sosial juga dimaksudkan sebagai cara untuk menanggulangi kemiskinan dan kerentanan absolut yang dihadapi oleh penduduk yang sangat miskin.

Gambar 8.2 Persentase Rumah Tangga menurut Jenis Program Perlindungan Sosial yang Diterima, 2019



Sumber: BPS, Susenas 2019

Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah suatu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara untuk menjamin warga negaranya memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak. Sistem jaminan sosial yang diberlakukan di Indonesia adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan. Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2019, terdapat 12,63 persen rumah tangga yang memiliki jaminan pensiun/hari tua. Selain itu, sebanyak 14,01 persen rumah tangga yang memiliki asuransi, meliputi asuransi kematian, asuransi kecelakaan kerja, dan pesangon PHK.

Tabel 8.1 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki atau Menerima Jaminan Sosial dalam Setahun Terakhir menurut Jenis Jaminan Sosial, 2019

Jenis Jaminan Sosial	Persentase Rumah Tangga
(1)	(2)
Jaminan Pensiun/hari tua	12,63
Asuransi/PHK	14,01

BPS, Susenas 2019

Aset Rumah Tangga

Kepemilikan aset rumah tangga menjadi salah satu tolak ukur tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin banyak aset yang dimiliki maka semakin sejahtera rumah tangga tersebut.

Dari hasil Susenas 2019, mayoritas rumah tangga di Kabupaten Natuna memiliki aset transportasi yaitu sebesar 89,89 persen. Mayoritas masyarakat di Kabupaten Natuna memiliki sepeda motor, karena tidak adanya kendaraan umum dengan trayek sehingga masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. Aset kendaraan terbesar kedua yaitu perahu motor, karena kondisi geografis Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah kepulauan sehingga penduduknya banyak yang berprofesi sebagai nelayan dan memiliki perahu motor, kemudian perahu, dan yang terakhir mobil. Sementara itu, sebesar 71,78 persen rumah tangga memiliki aset fasilitas rumah tangga yang meliputi lemari es/kulkas, AC, pemanas air, televisi, tabung gas/elpiji, dan telepon rumah.

Tabel 8.2 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Aset menurut Jenis Aset, 2019

Jenis Aset	Persentase Rumah Tangga
(1)	(2)
Aset Fasilitas Rumah Tangga	71,78
Aset Transportasi	89,89

Sumber: BPS, Susenas 2019



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://natunakab.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN NATUNA**

Jl. HR Soebrantas RT 001/RW 005, Ranai
Bunguran Timur, Natuna, 29783
Homepage: <https://natunakab.bps.go.id>
Email: bps2103@bps.go.id

ISBN 978-623-94884-6-8



9 786239 488468